

HEGEMONI DAN RESISTENSI PASCA PERANG JAWA DI MAGELANG ABAD XIX-XX AWAL

Colonial Hegemony and Islamic Resistance in Magelang after the Java War, 19th–Early 20th Century

Anton¹

¹SMA Ihsanul Fikri, Magelang, Indonesia, antonbogor@gmail.com

ARTICLE INFO

Article history:

Received 7 September, 2025

Revised 7 September, 2025

Accepted 8 September, 2025

Available online 9 September, 2025

Copyright © 2025 by Author. Published by
SMAIT IHSANUL FIKRI.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan mengkaji bentuk hegemoni kolonial dan resistensi umat Islam di Magelang pasca Perang Jawa (1825–1830). Magelang, sebagai basis militer Belanda sekaligus pusat misi Kristenisasi di Jawa. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan studi pustaka (library research), yang menelaah sumber-sumber sekunder berupa buku, jurnal, dan penelitian terdahulu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hegemoni kolonial diwujudkan melalui tiga instrumen utama: militerisasi kota, pendirian lembaga pendidikan modern ala Barat, serta pelayanan sosial berupa rumah sakit dan gereja. Strategi ini berfungsi tidak hanya sebagai kontrol politik, tetapi juga penetrasi ideologis dan kultural. Di sisi lain, resistensi umat Islam tampak dalam berbagai bentuk: konfrontatif, kultural-dialogis, serta simbolik. Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama memanfaatkan pendidikan dan jaringan pesantren untuk membendung kristenisasi, sedangkan perlawanan simbolik terwujud dalam penolakan budaya kolonial melalui sarung dan peci sebagai identitas Islam. Penelitian ini berkontribusi pada pemahaman dialektika kolonialisme dan Islam di Jawa, serta memperlihatkan bahwa meskipun kolonialisme menguatkan hegemoni, resistensi masyarakat tetap hidup melalui ruang-ruang religius, sosial, dan kultural.

Kata Kunci : Hegemoni kolonial, Perlawanan islam, Magelang

ABSTRACT

This study aims to examine the forms of colonial hegemony and Islamic resistance in Magelang after the Java War (1825–1830). As both a Dutch military base and a center of Christian missionary activities in Java. The research employs a qualitative method with a library research approach, analyzing secondary sources such as books, journals, and previous studies. The findings reveal that colonial hegemony was manifested through three main instruments: the militarization of the city, the establishment of Western-style educational institutions, and the provision of social services such as hospitals and churches. These strategies functioned not only as political control but also as ideological and cultural penetration. Meanwhile, Islamic resistance appeared in various forms: confrontational, cultural-dialogical, and symbolic. Organizations such as Muhammadiyah and Nahdlatul Ulama utilized education and pesantren networks to counter Christianization, while symbolic resistance was expressed through the rejection of colonial cultural attributes, with sarong and peci serving as markers of Islamic identity. This study contributes to understanding the dialectic between colonialism and Islam in Java, showing that despite the strength of colonial hegemony, resistance continued to thrive in religious, social, and cultural spheres.

Keywords: *colonial hegemony, islamic resistance, magelang*

PENDAHULUAN

Kekalahan Diponegoro telah menandai dikuasainya Pulau Jawa secara penuh sekaligus pintu masuk dilakukannya imperialisme secara nyata. Perang tersebut menjadi catatan penting betapa meluasnya dukungan masyarakat terutama dari kalangan kyai dan ulama. Agama menjadi sumber gerakan sosial yang menimbulkan instabilitas politik di tanah jajahan. Pasalnya, bukan hanya dilihat dari aspek korban jiwa, peristiwa tersebut mengakibatkan defisit keuangan yang parah yang mendorong kebijakan Tanam Paksa (*Cultuurstelsel*) pada 1830 (Carey, 2011).

Berakhinya Perang Jawa dan diasingkannya Diponegoro pada 1830 ke Manado, berujung pada tindakan pengawasan terhadap tokoh-tokoh agama seperti kyai, ulama, oleh pemerintah kolonial. Tindakan itu dilakukan untuk memutus jaringan perlawanan pengikut pangeran Diponegoro (laskar) di seluruh wilayah Jawa (Bizawie, 2020). Meskipun pemerintah memperoleh kemenangan besar atas perang tersebut, laskar-laskar yang berhasil lolos menjadi acaman serius di berbagai daerah. Para laskar tersebut berkamuflase menjadi warga setempat dan membangun pondok pesantren. (Fuadi et al., 2022).

Di Magelang, sejak pertengahan abad XIX, pemerintah kolonial Belanda memusatkan kekuatan militernya selama Perang Jawa (1825-1830). Magelang berfungsi sebagai markas militer Belanda selama perang, sementara lawannya, Pangeran Diponegoro dan pengikutnya mendirikan pos perlawanan di daerah pegunungan tepatnya di sisi Selatan dan Timur Magelang.

Selama era kolonial, misionaris memiliki pengaruh yang cukup besar. Propaganda Kristen, baik dari Protestan maupun Katolik, berkembang pesat di wilayah ini. Penyebarannya dimulai dari Semarang, Ungaran, Magelang, Muntilan, Temanggung, Ambarawa, dan Purworejo, hingga Yogyakarta. Orang-orang Kristen Belanda berusaha menyebarkan keyakinan mereka ke desa-desa terpencil. Pada tahun 1882-1884, hampir semua gereja yang dibangun oleh pengikut Sadrach dibakar. Sebuah survei penelitian tentang narasi lisan selama masa Sadrach menemukan bahwa hampir tidak ada kasus konversi dari Islam ke Kristen, tetapi ada kasus konversi dari agama Jawa ke Kristen atau ke Islam (Fatkhhan et al., 2023).

Memang pada masa ini kontrol pemerintah atas umat Islam dan pengikut-pengikut Diponegoro semakin represif. H.J Benda mengatakan bahwa, pemerintah kolonial tidak memiliki kebijakan yang jelas hingga akhir abad 19. Pemerintah diliputi ambiguitas dan kontradiksi dalam menghadapi perlawanan-perlawanan umat Islam. Ketidakmampuan menganalisis kekuatan umat Islam tersebut melahirkan kebijakan yang reaksioner (H.J Benda, 1980, Aqib Suminto, 1985, Khotimussalam, 2019).

Pada era ini pesantren sebagai suatu lembaga yang independen semakin termarjinalkan dari perhatian pemerintah. Pesantren bukan saja sebagai tempat belajar agama Islam secara ritual, namun juga menjadi basis identitas dan perlawanan. Selain itu perkembangan situasi internasional juga memberikan pengaruh terhadap situasi di Jawa. Dibukanya Terusan Suez mendorong massifnya hubungan antara Jawa dan mekah. Situasi tersebut memudahkan umat Islam di Jawa untuk melakukan ibadah haji. Para jemaah haji yang berangkat ke Mekah pada era ini bukan hanya sebatas melakukan kegiatan ritual, namun mereka menjalin komunikasi dan mendapatkan pengaruh dari pemikiran-pemikiran kaum pembaharu Islam.

Setelah mereka pulang dari ibadah haji, para jamaah tersebut menjadi agen-agen yang menyerukan perlawanan atas praktik kolonialisasi. Kondisi ini dijadikan senjata oleh pemerintah untuk kemudian mengendalikan pelaksanaan ibadah haji. Pemerintah juga mengeluarkan regulasi yang akan mengontrol pergerakan umat muslim di indonesia dimasa berikutnya (Karel Stenbrink, 1984, Bruinesen, 1990, Kartodirdjo, 2015). Meskipun era ini dianggap sebagai era kejumandan umat Islam, nyatanya banyak lahir intelektual-intelektual yang menulis karya-karya keislaman yang menakjubkan dan berpengaruh (Dzulkifli Hadi, 2018). Menurut Riklefs (2015) umat Islam yang belajar ke Mekah tersebut ketika pulang ke Jawa membawa corak kelslaman lebih yang puritan.

Pada awal abad XX, dominasi Kristen di Magelang menjadi semakin menonjol ketika mereka mengadakan kongres asosiasi politik Katolik di Indonesia pada tahun 1935 di Magelang. Pendirian sekolah Van Lith di Muntilan pada tahun 1928, yang masih ada hingga saat ini, adalah

bukti dari meningkatnya pengaruh propaganda Kristen. Sekolah ini menarik siswa dari kalangan Kristen maupun Muslim. Kegiatan Van Lith berkembang pesat di Muntilan dan sekitarnya. Dengan berbagai lembaga pendidikan dan asrama, Seminari Muntilan memiliki ratusan siswa, sebagian besar dari Yogyakarta Kondisi ini menimbulkan ketegangan masing-masing pihak, baik dari pihak pemerintah kolonial terhadap kelompok yang tersubordinasi yakni umat Islam di Magelang (Fatkhhan et al., 2023).

Studi ini berusaha menjawab beberapa pertanyaan antara lain; bagaimana bentuk-bentuk hegemoni kolonial pasca Perang Diponegoro di Magelang? dan bagaimana bentuk resistensi yang dilakukan oleh umat Islam sepanjang abad XIX dan awal abad XX di Magelang?

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini dengan melakukan tinjauan pustaka (*library research*), yakni dengan pengumpulan data dengan cara mencari sumber dan merkontruksi dari berbagai sumber seperti buku, jurnal, dan riset-riset yang sudah ada. Hasilnya bahwa penelitian kualitatif dilakukan dengan desain penelitian yang temuan-temuannya tidak didapatkan melalui prosedur statistik atau dalam bentuk hitungan, melainkan bertujuan mengungkapkan fenomena secara holistik-kontekstual dengan pengumpulan data dari latar alamiah dan memanfaatkan peneliti sebagai instrument kunci. Penelitian kualitatif memiliki sifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis pendekatan induktif, sehingga proses dan makna berdasarkan perspektif subyek lebih ditonjolkan. Desain penelitian kualitatif ini dapat dijadikan sebagai metode dalam penelitian, karena desainnya dijabarkan secara komprehensif yang mudah untuk dipahami oleh kalangan peneliti dan akademisi.

HASIL DAN PEMBAHSAN

A. Konsep Hegemoni

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), hegemoni didefinisikan sebagai pengaruh kepemimpinan, dominasi, atau kekuasaan yang dilakukan oleh suatu negara terhadap negara lain atau bagian dari negara tersebut (KBBI 2016). Kata "hegemoni" berasal dari bahasa Yunani kuno *eugemonia*, yang pada masa itu merujuk pada dominasi posisi yang diklaim oleh negara-kota tertentu, seperti Athena dan Sparta, atas negara-kota lainnya. Dalam teori hegemoni yang dikembangkan oleh Antonio Gramsci, konsep ini tidak hanya merujuk pada dominasi berbasis kekuasaan fisik, tetapi juga melibatkan persetujuan yang diperoleh melalui kepemimpinan politik dan ideologis.

Hegemoni menurut Gramsci adalah ketika sebuah kelas sosial menjalankan kekuasaan atas kelas-kelas lain melalui kombinasi antara kekerasan dan persuasi. Dengan kata lain, dominasi dalam teori Gramsci tidak hanya bersifat koersif tetapi juga ideologis, di mana persetujuan masyarakat diberikan terhadap kepemimpinan tersebut melalui proses yang tidak selalu disadari (Suyanto, B., & Sutinah, 2018)

Gramsci berargumen bahwa hegemoni bergantung pada kemampuan kelas penguasa untuk menanamkan ideologi tertentu yang diterima secara luas oleh masyarakat. Hegemoni didasarkan pada penyebaran ideologi atau keyakinan baru yang dapat dilakukan melalui pembiasaan, propaganda terselubung, atau bahkan pemaksaan ke dalam kesadaran kolektif masyarakat. Jean Baudrillard, dalam bukunya *The Agony of Power; Dominasi, Hegemoni, Teror*, menyebutkan bahwa hegemoni adalah bentuk dominasi yang lebih canggih. Jika dominasi cenderung bersifat fisik, maka hegemoni beroperasi pada level ideologi dan budaya.

B. Bentuk-Bentuk Hegemoni Di Magelang

1. Menjadikan Magelang sebagai Basis Militer

Situasi politik, ekonomi dan keamanan sesudah selesainya Perang Jawa (1825-1830), berpengaruh sangat besar terhadap morfologi (bentuk dan struktur) kota-kota di Pulau Jawa. Cengkeraman kekuasaan yang makin kuat terhadap kota-kota pedalaman sesudah Perang Jawa mengakibatkan pemerintah kolonial menentukan kota-kota strategis di Jawa sebagai garnizun, salah satunya adalah Magelang (Handinoto, 2005).

Sejak abad ke-19, Magelang telah berfungsi sebagai pusat pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Kota ini ditetapkan sebagai ibu kota Karesidenan Kedu pada tahun 1818 yang terdiri atas daerah Temanggung, Wonosobo, Purworejo, dan Kebumen. Lokasinya yang strategis menjadikan Magelang sebagai kota dengan tingkat interaksi sosial-budaya yang ramai, termasuk dalam aspek keagamaan(Fatkhan et al., 2023).

Perang Jawa adalah perlawanan besar terakhir terhadap kekuasaan kolonial Belanda di Jawa. Akhir Perang Jawa pada tahun 1830 membawa perubahan politik, sosial, dan budaya ke Jawa, serta transformasi religius. Kekuasaan kolonial Belanda menjadikan Magelang dan sekitarnya sebagai pusat pertahanan kekuatan militer Belanda. Hal ini dimulai dengan penangkapan Pangeran Diponegoro dalam peristiwa yang dikenal sebagai pengkhianatan diplomasi Jenderal De Kock di Kota Magelang pada 28 Maret 1830. Penangkapan ini terjadi setelah berbagai upaya dilakukan untuk menangkapnya, termasuk menyebarkan selebaran untuk kompetisi dengan hadiah 20 ribu gulden (setara

dengan \$536.000) dari pemerintah Belanda untuk kepada Pangeran Diponegoro (Fatkhan et al., 2023).

Sejak saat itu, Koloni Belanda meningkatkan kewaspadaan terhadap Magelang dan daerah sekitarnya, termasuk Kedu secara umum, untuk memantau semua aktivitas para ulama (pemimpin agama Islam) dan pengikut mereka. Setiap aktivitas yang berpotensi memobilisasi umat Islam dan memicu gerakan politik dilarang. Inilah sebabnya jarang terdengar aktivitas Muslim yang berskala besar di Magelang dan sekitarnya. Keberhasilan misi Katolik di Muntilan dan sekitarnya tidak lepas dari stabilitas yang diciptakan oleh keberadaan militer di Magelang. Garnisun memberikan rasa aman bagi para misionaris, sekaligus menekan resistensi umat Islam terhadap gerakan kristenisasi.

2. Mendirikan Lembaga Pendidikan

Pasca berakhirnya Perang Jawa (1825-1830), hegemoni kolonial semakin nyata dalam penerapannya di Hindia Belanda. Untuk menanggulangi potensi kebangkitan "fanatisme Islam" yang pernah mengancam stabilitas sebelumnya pada abad XIX, pemerintah kolonial mengambil langkah-langkah yang strategis. Salah satunya adalah dengan mendirikan lembaga konsultasi khusus, dikenal sebagai *Adviseur voor Inlandsche zaken*, yang bertugas memahami secara mendalam dinamika dan nilai-nilai masyarakat pribumi. Selain itu, sebagai bagian dari semangat politik etis, pendirian sekolah-sekolah modern dengan kurikulum barat dilakukan untuk memperluas penetrasi budaya Eropa di wilayah koloni (Aqib Suminto, 1985)

Kristenisasi masuk ke Jawa Tengah bersamaan dengan diberlakukannya kebijakan politik etis. Di Magelang juga menjadi pusat penting kristenisasi Katolik di Jawa, yaitu Muntilan. Di tempat ini, Pater Franciscus van Lith SJ mendirikan sekolah guru (Kweekschool) pada 1890-an. Lembaga tersebut melahirkan kader-kader Katolik Jawa yang kelak menempati posisi penting dalam masyarakat. Saat itu, para pemimpin Kristen berasumsi bahwa Yogyakarta dan Jawa Tengah merupakan tempat yang sulit dalam penyebaran agama Kristen. Melalui seorang pastor bernama Franciscus van Lith kesulitan aktivitas misi terepecahkan. Van Lith menerjemahkan kitab suci yang berbahasa latin ke dalam bahasa Jawa. Snouck Hurgronje dan J.H. Abendanon yang menjabat sebagai direktur pendidikan pertama pada era Etis (1900–1905), mendukung pendidikan elitis untuk membentuk kelompok priyayi terdidik yang setia dan mendukung pemerintahan Belanda. Mereka memandang pendidikan Barat bagi kalangan elite pribumi penting untuk menciptakan birokrat yang kompeten, mengurangi pengaruh

Islam yang dianggap "fanatik," dan menginspirasi masyarakat umum (Ricklefs 1993: 156). Sebaliknya, Gubernur Jenderal I.B. Van Heutsz (1904–1909) dan A.W.F. Idenburg (1909–1916) lebih memilih pendidikan dasar praktis untuk masyarakat luas demi mendukung keberhasilan Politik Etis (Van Niel 1970: 47). Pendekatan ini melahirkan berbagai lembaga pendidikan yang juga berperan memecah-belah umat Islam, guna menyatukan kedalam masyarakat kolonial.

Bagi anak-anak priyayi dan keluarga kaya, pemerintah memperluas akses ke sekolah-sekolah bergaya Eropa, seperti Hollandsch-Inlandsche School (HIS) pada 1914, yang menggunakan bahasa daerah atau Melayu pada tahap awal, dan Belanda pada tahap lanjutan. Walaupun HIS dirancang untuk bangsawan dan kaum terpandang, mayoritas siswanya berasal dari kalangan priyayi rendahan Di tingkat menengah, pemerintah mendirikan Meer Uitgebreid Lager Onderwijs (MULO) pada 1914 dan Algemeene Middelbare School (AMS) pada 1918 untuk menyiapkan siswa ke tingkat universitas atau posisi administratif tinggi (Van der Veur 1969: 3, 26–29; Kartodirdjo 1991: 339).

Di tingkat pendidikan tinggi, pemerintah mereorganisasi sekolah kepala pribumi menjadi OSVIA pada 1900, yang mulai menerima siswa dari berbagai latar belakang asalkan memenuhi syarat akademik (Ricklefs 1993: 156–157). Sekolah kedokteran STOVIA diperbarui menjadi setara dengan universitas rendah, dengan lulusan bergelar Indische Arts. Selain itu, eksperimen untuk mengirim siswa pribumi belajar ke Belanda dimulai, dengan lima siswa pada 1900 dan meningkat menjadi 25 pada 1908. Reorganisasi pendidikan ini meningkatkan jumlah pribumi terdidik secara signifikan, mencapai 310.496 pada 1910, dan 829.802 pada 1920, termasuk dampak dari sekolah-sekolah bergaya Eropa seperti HIS, MULO, dan AMS (Van Niel 1970: 219–220).

Kristenisasi di Magelang menjadi semakin menonjol ketika para misionaris mengadakan kongres asosiasi politik Katolik di Indonesia pada tahun 1935. Pendirian sekolah Van Lith di Muntilan pada tahun 1928, menarik siswa dari kalangan Kristen maupun Muslim. Kegiatan Van Lith berkembang pesat di Muntilan dan sekitarnya. Dengan berbagai lembaga pendidikan dan asrama, Lembaga Seminari Muntilan memiliki ratusan siswa, sebagian besar dari Yogyakarta. Kiai Sadrach, tokoh kristen-kejawen yang mendirikan komunitas Kristen terbesar di Jawa Tengah, merupakan tokoh berpengaruh kedua setelah Van Lith. Sebagian besar umat Muslim Jawa yang mayotas muslim menentang penyebaran Kristen. Umat Muslim membakar gereja-gereja yang dibangun oleh pengikut Sadrach pada tahun 1882-1884. Sebuah penelitian tentang narasi lisan

selama masa Sadrach menemukan bahwa hampir tidak ada kasus konversi dari Islam ke Kristen, tetapi terdapat kasus konversi dari agama Jawa ke Kristen atau ke Islam.

3. Membangun Balai Pengobatan

Gerakan misionaris Kristen di Magelang dijalankan melalui strategi yang cukup halus, yakni dengan menarik simpati masyarakat. Para zendeling tidak hanya berfokus pada dakwah keagamaan, tetapi juga berusaha menampilkan diri sebagai pembawa kemajuan dan kesejahteraan. Hal ini tampak dari pembangunan rumah sakit umum dan gereja yang terbuka bagi penduduk lokal. Upaya Kristenisasi terbesar yang dilakukan oleh Zending adalah mengirim 23 dokter dan 28 perawat dari Eropa. Selain itu, Christian and Missionary Alliance (CMA) juga mengirim 22 pendeta Amerika (Fatkhan et al., 2023).

Rumah sakit menjadi sarana penting untuk menunjukkan wajah humanis misi Kristen, sehingga pelayanan kesehatan yang diberikan seolah menjadi bentuk kepedulian terhadap rakyat. Di sisi lain, pembangunan gereja menegaskan kehadiran permanen misionaris di ruang publik Magelang, sekaligus sebagai simbol ekspansi budaya dan agama kolonial. Cara ini menunjukkan bahwa kristenisasi tidak selalu dilakukan secara frontal, tetapi melalui pendekatan sosial yang terkesan inklusif.

Selain melalui pembangunan fasilitas publik, Magelang juga diposisikan sebagai pusat aktivitas misionaris dengan diselenggarakannya kongres-kongres penting. Salah satunya adalah pertemuan asosiasi politik Katolik dan De Gereformeerde Zending di wilayah Midden-Java. Pemilihan Magelang sebagai lokasi penyelenggaraan memperlihatkan bahwa kota ini memiliki arti strategis dalam jaringan zending di Jawa Tengah. Kongres tersebut tidak hanya membahas misi keagamaan, tetapi juga bagaimana misionaris bisa mengambil bagian dalam dinamika sosial-politik yang berkembang. Dengan demikian, Magelang bukan sekadar kota garnisun kolonial, tetapi juga menjadi laboratorium ideologis bagi penyebaran nilai-nilai Kristen dan Barat melalui forum resmi yang melibatkan berbagai kelompok.

Agenda misionaris ini berjalan beriringan dengan kebijakan pemerintah kolonial Belanda yang secara sistematis menekan gerakan Islam. Belanda menyadari bahwa pesantren, ulama, dan organisasi Islam sering menjadi basis perlawanan terhadap kolonialisme. Oleh karena itu, berbagai regulasi dibuat untuk membatasi ruang gerak umat Islam. Misalnya, izin pendirian lembaga pendidikan Islam dipersulit, kegiatan keagamaan diawasi ketat, dan tokoh-tokoh Islam yang dianggap radikal diawasi bahkan ditindas. Dengan cara ini, Belanda berusaha melemahkan potensi resistensi politik

berbasis agama, sekaligus membuka ruang lebih luas bagi agenda kristenisasi yang dijalankan para zendeling.

Keterpaduan antara gerakan misionaris dan kebijakan represif kolonial menunjukkan strategi ganda kolonialisme di Magelang. Di satu sisi, rakyat “dirayu” dengan pelayanan kesehatan, pendidikan, dan kegiatan sosial dari para zendeling. Di sisi lain, mereka ditekan dengan kebijakan diskriminatif yang membatasi ekspresi Islam. Strategi ini memperlihatkan bentuk hegemoni kolonial yang tidak hanya bersandar pada kekuatan militer, tetapi juga pada penetrasi ideologis melalui agama dan budaya.

Resistensi Umat Islam

1. Gerakan Konfrontasi

Islam sebagai agama yang dianut mayoritas penduduk Indonesia memiliki posisi yang penting. Meskipun antropologis komposisi umat Islam secara kesalehan sebagian dibagi dalam kategori-kategori tertentu (Geertz, 2013). Islam menjadi pengukur loyalitas dan dasar persatuan dimana merupakan hal yang penting dengan berkembangnya kekuasaan Belanda di seluruh pelosok tanah air. Islam juga dipandang sebagai ancaman terhadap kedudukan Belanda. Begitu juga sebaliknya, datangnya bangsa Belanda dalam pandangan orang Indonesia merupakan penyerangan terhadap Islam. Meskipun pada awalnya bangsa Belanda fokus dalam perdagangan berbeda dengan bangsa Portugis dan Spanyol yang terang-terangan memerangi Islam dan menggantikannya dengan agama Kristen (Noer, 1978).

Pada pertengahan abad XIX, ketika kolonialisme menancapkan dominasinya di berbagai wilayah Nusantara, reaksi masyarakat pribumi difasilitasi, diberi isi dan tujuan oleh komunitas-komunitas keagamaan tersebut. Komunitas keagamaan menjadi simpul pemberontakan politik sepanjang abad 19. Beberapa contoh pemberontakan yang menggunakan simbolisme keagamaan antara lain; Perang Cirebon (1802-1806), Perang Jawa atau Perang Diponegoro (1825-1830), Perang Paderi di Sumatera Barat (1821-1838), Perang Banjarmasin atau perang Antasari (1859-1862), Pemberontakan Petani Banten atau Jihad di Cilegon (9-30 Juli 1888), dan Perang Aceh (1873-1903).

Di era ini, Propaganda Protestan dan Katolik berkembang sangat pesat di Magelang. Pusat propaganda ini meluas dari Semarang, Ungaran, Ambarawa, Temanggung, Muntilan, Purworejo hingga Yogyakarta. Meskipun Muhammadiyah berpusat di Yogyakarta, kegiatan gerakan Islam di Magelang dan sekitarnya tidak begitu berpengaruh. Komunitas berbasis “Al-Iman” yang dipimpin oleh Segaf Al Jufri adalah satu-satunya sekolah Islam (madrasah)

yang dianggap terorganisir dengan baik dan berkualitas. Demikian pula, meskipun sudah ada cabang Muhammadiyah dan *Jong Islamieten Bond* di Magelang, organisasi-organisasi ini hanya ada di sebagian kecil kelas menengah dan tidak mencapai kelas bawah, apalagi para ulama. Beberapa Muslim Jawa tidak menyukai penyebaran Kristen. Pada tahun 1882-1884, hampir semua gereja yang dibangun oleh pengikut Sadrach dibakar. Berdasarkan survei penelitian, ditemukan fakta lain bahwa selama era Sadrach hampir tidak ada kasus konversi dari Islam ke Kristen, tetapi yang terjadi adalah konversi dari agama Jawa ke Kristen atau ke Islam (Fatkhhan et al., 2023).

2. Gerakan Dialog dan Kultural Ormas Islam

Tahun 1919, organisasi Muhammadiyah mulai aktif membendung kristenisasi di Magelang. Pembendungan dilakukan secara damai dan dialogis. Ahmad Dahlan sebagai pimpinan Muhammadiyah datang langsung atas permintaan warga dan berhasil mematahkan argumen para pastor dalam debat, sekaligus mempertahankan hak atas tanah warga Kauman. Muhammadiyah menolak konfrontasi langsung dan memilih pendekatan pendidikan sebagai sarana perlawanan. Muhammadiyah mendirikan sekolah-sekolah Islam setara dengan sekolah Belanda, seperti Kweekschool Islam yang kelak menjadi Madrasah Mu'allimin Muhammadiyah. Meskipun dekat dengan tokoh-tokoh Kristen, Ahmad Dahlan justru memanfaatkan hubungan itu untuk menyusun strategi dakwah yang lebih rasional. Dalam debat melawan misionaris asing seperti Domine Baker dan Zwemer, Ahmad Dahlan berhasil menunjukkan superioritas pemikiran Islam. Muhammadiyah juga mendirikan berbagai lembaga sosial sebagai alternatif dari dominasi pelayanan misi Kristen, termasuk sekolah, klinik, dan panti asuhan.

Pada dekade 1930-an, Nahdatul Ulama mengambil peran dalam membendung laju kristenisasi di Magelang. Upaya itu dilakukan melalui strategi kultural, politik, dan pendidikan. Salah satu langkah penting adalah pendirian cabang NU di Magelang oleh Kiai Dalhar pada 1939. Selain itu NU juga menyelenggarakan Kongres ke-14 di Magelang. Pemilihan lokasi ini memiliki tujuan yaitu untuk menghentikan pengaruh kristenisasi yang berkembang di Muntilan. NU juga mendorong pembentukan berbagai lembaga internal seperti Departemen Ma'arif, Muslimat, dan Ansor sebagai bentuk penguatan organisasi. NU melawan kebijakan diskriminatif kolonial, seperti menuntut pencabutan Ordonansi Guru 1925 dan menolak ketimpangan subsidi keagamaan. Dakwah menjadi senjata utama NU, terutama melalui jaringan pesantren yang tersebar di pedesaan. Ketika Belanda memperketat pengawasan sekolah swasta melalui Wilde Scholen Ordonnantie (Ordonansi sekolah liar), para kiai NU

tetap melakukan dakwah ke desa-desa melalui pesantren sebagai benteng pertahanan kultural

3. Perlawanannya Simbolik Abad dari abad XIX-XX Awal

Dalam konteks psikologis, penolakan terhadap aspek-aspek budaya kolonial seperti gaya berpakaian, sistem pendidikan, dan teknologi, bisa dilihat sebagai reaksi traumatis terhadap kekalahan umat Islam atas dominasi kolonial. Kondisi ini mencerminkan semangat perlawanannya yang tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga menolak secara sistematis pengaruh budaya yang berasal dari luar termasuk agama. Sarung menandakan atribut khas yang menandai eksistensi suatu kelompok yang betahan dari upaya hegemoni kultural tersebut dari kelompok yang bekuasa (Firdausi et al., 2023).

Penolakan atribut dari segala anasir-anasir kolonial adalah reaksi sebagian kelompok masyarakat yang menolak tunduk pada pihak yang bekuasa dalam hal ini adalah kaum santri. Dengan demikian, upaya pemerintah kolonial dalam memperluas pengaruh budaya Eropa di Hindia Belanda tidak hanya menimbulkan resistensi fisik, tetapi juga mencetuskan pertentangan ideologis dan kultural. Perdebatan antara kaum muslim tradisionalis terhadap kaum modernis pada awal abad XX adalah gambaran betapa resistensi kalangan muslim tradisionalis terhadap budaya Eropa memiliki dasar historis bukan hanya sekadar tafsir yang dogmatis (Hafid, 2018).

Adapun penggunaan peci atau kopiah bagi kelompok pergerakan nasional berkembang sejak awal abad XX sebagai bentuk perlawanannya terhadap kebijakan pemerintah kolonial yang diskriminatif. Peraturan yang melarang penggunaan pakaian Eropa serta mewajibkan siswa menggunakan pakaian adat masing-masing daerah dinilai sangat melukai harkat dan martabat. Pemerintah tidak hanya berlaku diskriminatif tetapi juga ada upaya untuk memecah-mecah persatuan bangsa. Mempertahankan corak feodalistik di kalangan masyarakat agar melunturkan semangat persatuan (Hadiwijaya, 2019).

Sebagian aktifis berupaya melawan peraturan ini dengan membawa semangat yang lebih egaliter. HOS Tjokroaminoto merupakan salah satu tokoh yang mengambil sikap dalam peraturan ini. Pendiri Sarekat Islam ini yang awalnya kerap menggunakan blangkon beralih mengguakan peci dalam kesehariannya. Perubahan ini kemudian menjadi inspirasi tokoh-tokoh lainnya baik lintas organisasi. Penggunaan peci juga banyak diminati oleh kalangan pesantren sehingga selain menggunakan sarung, kaum santri juga terbiasa menggunakan peci. Hal ini menunjukkan bahwa peci bukan hanya digunakan oleh golongan tertentu yang mendapatkan pendidikan ala barat tapi juga telah menjadi identitas bersama.

KESIMPULAN

Kekalahan Pangeran Diponegoro dalam Perang Jawa (1825–1830) menjadi titik balik jatuhnya Jawa sepenuhnya ke dalam genggaman kolonial Belanda, yang tidak hanya meninggalkan luka mendalam berupa korban jiwa dan kerugian material, tetapi juga melahirkan kebijakan sistem Tanam Paksa pada 1830 serta menjadikan Magelang sebagai basis militer penting, terutama setelah penangkapan Diponegoro di kota ini. Namun, kemenangan Belanda tidak serta-merta menghapus perlawanan, sebab pengikut Diponegoro yang lolos melanjutkan perjuangan secara kultural dan religius melalui pesantren dan dakwah Islam, sehingga agama menjadi identitas sekaligus kekuatan sosial yang terus bertahan. Kesadaran kolonial akan potensi Islam melahirkan pengawasan ketat terhadap ulama dan pesantren, sementara hegemoni juga dijalankan melalui strategi ideologis dan kultural berupa pendidikan Barat, kristenisasi, serta pelayanan sosial yang dibungkus dengan wajah “kemajuan,” di mana Muntilan menjadi pusat kristenisasi Katolik melalui karya Pater Franciscus van Lith. Meski demikian, umat Islam di Magelang menunjukkan resistensi berlapis: resistensi konfrontatif berupa gerakan kekerasan dan anti-Kristenisasi, resistensi dialogis seperti yang dilakukan Muhammadiyah dengan strategi pendidikan dan pembelaan intelektual, resistensi kultural melalui penguatan pesantren dan NU, serta resistensi simbolik dengan mempertahankan identitas kultural Islam seperti sarung dan peci sebagai penanda solidaritas. Dengan demikian, sejarah Magelang pada abad XIX hingga awal abad XX memperlihatkan dialektika tajam antara hegemoni kolonial dan resistensi Islam, di mana kolonialisme menghadirkan dominasi militer, pendidikan, dan kristenisasi, sementara umat Islam merespons dengan perlawanan yang terus hidup dalam ruang-ruang religius, kultural, dan simbolik masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Bizawie, Z. M. (2020). DIPONEGORO AND THE ULAMA NUSANTARA NETWORK. *The International Journal of Pegan: Islam Nusantara Civilization*, 3(02), 193–223. <https://doi.org/10.51925/inc.v3i02.26>
- Carey, P. B. R. (2019). *Takdir: Riwayat Pangeran Diponogoro, 1785-1855* (M. Karim, Ed.; B. Murtianto & P. M. Laksono, Trans.; Edisi revisi, Cetakan keenam). Penerbit Buku Kompas.
- Dzulkifli Hadi, I. (2018). INDONESIAN ULAMA AND THEIR ACADEMIC AND DA'WA CONTRIBUTION IN THE ISLAMIC WORLD IN THE 19TH CENTURY. *Indonesian Journal of Interdisciplinary Islamic Studies*, 1(2), 195–220. <https://doi.org/10.20885/ijiis.vol1.iss2.art8>

- Fadli, M. R. (2021). Memahami desain metode penelitian kualitatif. *HUMANIKA*, 21(1), 33–54. <https://doi.org/10.21831/hum.v21i1.38075>
- Fatkhan, M., Abdurrahman, D., & Hak, N. (2023). Against Christianization: Socio-Religious Movements in Magelang after the Java War. *ESENSIA: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin*, 23(2), 167–175. <https://doi.org/10.14421/esensia.v23i2.3924>
- Firdausi, F., Sahrawi, S., Aziz, D., & Tohari, M. (2023). Kopiah dan Sarung Identitas Pesantren: Histori Perlawanan Santri Terhadap Kebudayaan Eropa. *Alhamra Jurnal Studi Islam*, 4(2), 195. <https://doi.org/10.30595/ajsi.v4i2.18824>
- Fuadi, M. A., Mahbub, Moh., Safitry, M., Usman, U., Rohmatulloh, D. M., & Muzakki, M. H. (2022). Pesantren Tradition and the Existence of Tarekat Syattariyah in the Java War of 1825-1830. *TSAQAFAH*, 18(1), 165. <https://doi.org/10.21111/tsaqafah.v18i1.7666>
- Geertz, C. (2013). *Agama Jawa: Abangan, santri, priyayi dalam kebudayaan Jawa* (A. Mahasin & B. Rasuanto, Trans.; Cetakan pertama). Komunitas Bambu.
- Hadiwijaya, D. (2019). Kopiah/Peci sebagai Salah Satu Atribut Identitas Bangsa Indonesia. *JOURNAL OF APPLIED SCIENCE (JAPPS)*, 1(2), 031–040. <https://doi.org/10.36870/japps.v1i2.50>
- Hafid, H. (2018). PENDIDIKAN PESANTREN DAN TANTANGAN MODERNISASI. *Kariman: Jurnal Pendidikan Keislaman*, 1(1), 47–66. <https://doi.org/10.52185/kariman.v1i1.4>
- Kartodirdjo, S. (2015). *Pemberontakan petani Banten 1888*. Komunitas Bambu.
- Khotimussalam, M. (2019). THE DUTCH ISLAMIC POLICIES: PERAN POLITIK CRISTIAN SNOUCK HURGRONJE DI WILAYAH INDIA-BELANDA. *Jurnal Tamaddun : Jurnal Sejarah Dan Kebudayaan Islam*, 7(1). <https://doi.org/10.24235/tamaddun.v7i1.4509>
- Latif, Y. (2020). *Pendidikan yang berkebudayaan: Histori, konsepsi, dan aktualisasi pendidikan transformatif*. PT Gramedia Pustaka Utama.
- Noer, D. (1978). *The modernist Muslim movement in Indonesia: 1900 - 1942* (2. impr). Oxford University Press.
- Carey, P. B. R. (2011). *Kuasa ramalan: Pangeran Diponegoro dan akhir tatanan lama di Jawa, 1785–1855*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia (KPG) & KITLV-Jakarta.
- Suyanto, B., & Sutinah. (2018). *Memahami teori sosial*. Surabaya: Unair Press.
- Noer, D. (1980). *Gerakan modern Islam di Indonesia 1900–1942*. Jakarta: LP3ES.
- Ricklefs, M. C. (2008). *Sejarah Indonesia modern 1200–2008*. Jakarta: Serambi.
- Benda, H. J. (1985). *Bulan sabit dan matahari terbit: Islam di Indonesia pada masa pendudukan Jepang*. Jakarta: Pustaka Jaya.

Steenbrink, K. (1984). *Beberapa aspek tentang Islam di Indonesia abad ke-19*. Jakarta: Bulan Bintang.

Suminto, A. (1996). *Politik Islam Hindia-Belanda*. Jakarta: LP3ES.